

## **Abstrak**

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan hukum perdata yang sering terjadi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabanjahe berdasarkan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN KBJ. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan secara cermat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam perkara ini, tindakan tergugat dinilai telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena melanggar hak atas tanah pihak penggugat serta tidak memiliki dasar hukum yang sah. Pertimbangan hakim juga didasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak serta ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah di Kabanjahe telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun masih terdapat kendala dalam pembuktian hak kepemilikan tanah. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian hakim dalam menilai alat bukti serta perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait kepemilikan tanah yang sah.

**Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Tanah, Putusan Pengadilan, Kabanjahe.**

## **ABSTRACT**

Land disputes are one of the most common civil law issues in Indonesia, particularly those related to unlawful acts. This study aims to analyze the application of the elements of unlawful acts in the resolution of land disputes in Kabanjahe based on Decision Number 37/Pdt.G/2022/PN KBJ. The research method used is normative legal research with a case approach and a statutory approach. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the panel of judges in the decision carefully considered the elements of an unlawful act, namely the existence of an act, fault, damage, and a causal relationship between the act and the resulting damage. In this case, the defendant's actions were deemed to have fulfilled the elements of an unlawful act because they violated the plaintiff's land rights and lacked a valid legal basis. The judges' considerations were also based on the evidence presented by the parties and the applicable legal provisions, including the Civil Code.

The conclusion of this study is that the application of the concept of unlawful acts in land disputes in Kabanjahe is in accordance with the prevailing legal provisions, although there are still obstacles in proving land ownership rights. Therefore, careful and thorough assessment of evidence by judges is required, as well as increased public legal awareness regarding lawful land ownership.

**Keywords: Unlawful Act, Land Dispute, Court Decision, Kabanjahe.**